

ABSTRAK

Moh. Syahroni, 1712143053, Studi Analisis Pasal 70 Ayat (3) mengenai Cuti Selama Masa Kampanye bagi Calon *Incumbent* dalam Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menurut Perspektif Hukum Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2018, Pembimbing: Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawie, S.H, M.Si.

Kata kunci: Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016, Cuti, Masa Kampanye, Calon *Incumbent*, hukum islam.

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa pemilu dalam sistem demokrasi ini merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Sedangkan dalam Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016 Pasal 70 Ayat (3) yang menyatakan tentang Cuti Selama Masa Kampanye bagi Calon *Incumbent*. Maka dari pasal tersebut banyak terjadi pro dan kontra oleh para pakar politik hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana substansi Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016 dan berbagai aturan perubahannya dalam perspektif hukum politik di Indonesia, 2) Bagaimana substansi Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016 dan berbagai aturan perubahannya dalam perspektif hukum islam? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis Bagaimana substansi Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016 dan berbagai aturan perubahannya dalam perspektif hukum politik di Indonesia, 2) Untuk menganalisis Bagaimana substansi Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016 dan berbagai aturan perubahannya dalam perspektif hukum islam

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (telaah pustaka). Adapun sumber data yang digunakan dalam kajian ini adalah sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumenter dengan mengumpulkan bahan dari sumber-sumber data primer, sekunder yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, bulletin, wawancara dan sebagainya. Sedangkan teknik analisis data menggunakan kualitatif, dengan menggunakan penalaran deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bahwa calon kepala daerah *incumbent* harus menjalani cuti selama masa kampanye. Hal tersebut bertujuan agar terwujudnya suatu pemilihan umum yang bersih, adil, dan demokrasi. Terlebih ketika urusan pemerintahan itu bisa di mandatkan kepada pelaksana tugas (Plt) gubernur selama masa kampanye seperti penyusunan maupun penandatanganan APBD, maka cuti dalam masa kampanye harus dilakukan bagi calon kepala daerah *incumbent*. 2)

Bahwa dalam islam untuk mengantisipasi penyalahgunaan wewenang bagi calon kepala daerah *incumbent*, maka harus menjalani masa cuti selama kampanye berlangsung. Meskipun seorang kepala daerah mempunyai kewajiban untuk mengawasi kinerja birokrasi pemerintahan, akan tetapi dampak pada penyalahgunaan wewenang itu akan menimbulkan dampak yang lebih besar.

ABSTRACT

Moh. Syahroni, 1712143053, Study of Analysis Article 70 Paragraph (3) concerning Leave During The Campaign Period for Incumbent Candidates in the Electoral Law No. 10 Year 2016 on the Election of Governors, Regents, and Mayors according to Islamic Law Perspective, Islamic Family Law School, Faculty of Law and Sharia, IAIN Tulungagung, 2018, Supervisor: Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawie, S.H., M.Si.

Keywords: Electoral Law no. 10 Year 2016, Leave, Campaign, Incumbent Candidate, Islamic Law.

This research is motivated that the election in this democratic system is a means of implementation of the sovereignty of the people in the unitary state of the Indonesian republic based on Pancasila and the constitution of the Republic of Indonesia in 1945. Whereas in the Election Law no. 10 Year 2016 Article 70 Paragraph (3) stating the Leave During the Campaign Period for the Incumbent Candidate. So from the article there are many pros and cons by the legal experts of the law.

The formulation of the problem in this research are: 1) How the substance of Article 70 Paragraph (3) of Law of Regional Head Election No. 10 Year 2016 and the various rules of change in the perspective of political law in Indonesia, 2) How the substance of Article 70 Paragraph (3) Law of Regional Head Election No. 10 of 2016 and the various rules of change in the perspective of Islamic law? As for the purpose of this study are: 1) To analyze how the substance of Article 70 Paragraph (3) Law No Local Elections. 10 Year 2016 and the various rules of amendment in the perspective of political law in Indonesia, 2) To analyze how the substance of Article 70 Paragraph (3) Law of Regional Head Election No. 10 of 2016 and the various rules of change in the perspective of Islamic law

This research uses library research method (literature review). The data sources used in this study are primary and secondary data sources. Data collection techniques used in this study using documentary study techniques by collecting materials from primary data sources, secondary in the form of notes, transcripts, books, newspapers, magazines, bulletins, interviews and so forth. While the data analysis technique using qualitative, using deductive reasoning.

The results of this study indicate that: 1) That the incumbent head candidate must be on leave during the campaign period. It aims to create a clean, fair and democratic election. Especially when government affairs can be mandated to the governor's taskforce during the campaign period such as the preparation and signing of APBD, then leave in the campaign period must be done for incumbent regional head

candidates. 2) Whereas in Islam to anticipate abuse of authority for incumbent regional head candidates, it must undergo a period of leave during the campaign. Although a local head has the duty to oversee the performance of the government bureaucracy, the impact on the abuse of authority will have a greater impact.